



**Judul** : RUU HKPD Perkuat Desentralisasi Fiskal  
**Tanggal** : Sabtu, 13 November 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Dito Sosialisasi Di Jawa Tengah

# RUU HKPD Perkuat Desentralisasi Fiskal

SENAYAN masih menggodok Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD). RUU ini merupakan dukungan dan penguatan atas pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan perpajakan daerah.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan, RUU HKPD nantinya mengatur secara komprehensif peningkatan *local taxing power* (kapasitas pajak daerah). Termasuk, penyesuaian objek pajak daerah, pembe-

rian opsi retribusi tambahan, pemberian insentif bagi pelaku usaha ultra mikro, reformulasi transfer ke daerah yang lebih berkeadilan.

RUU juga akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal pusat dengan kebijakan fiskal daerah. Ini untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional di tengah perekonomian dunia yang tidak pasti.

"Agar ada satu skema fiskal yang adil antara semua daerah, yang merupakan bentuk penginte-

grasian dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009," jelas Dito dalam sosialisasi dan jaring aspirasi dengan seluruh Kepala Daerah se-Jawa Tengah di Kota Semarang, Kamis (11/11).

Bendahara Umum Partai Golkar ini mengatakan, RUU HKPD juga akan memberikan manfaat pembangunan daerah baik dari sisi dana transfer, baik Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus

(DAK). Termasuk adanya opsi (penambahan persentase) pajak agar pemungutan bisa lebih terintegrasi.

"Dengan ini, nantinya tidak ada lagi permasalahan keterlambatan bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota dan juga dapat memberikan pemanfaatan untuk pembangunan di daerah," ungkapnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah VIII melanjutkan, RUU HKPD diharapkan dapat mengurangi ketimpangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Selain itu, RUU ini diyakini mampu meningkatkan kemandirian daerah, serta dapat memberikan perbaikan yang signifikan terhadap pemerataan pelayanan publik yang memadai dan kesejahteraan masyarakat.

Dia berharap, RUU HKPD dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Kita ingin menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. ■ KAL